

# PENGELOLAAN HUTAN PRODUKTIF UNTUK AKTIVITAS WISATA TUMPAK LEGO

## *(PRODUCTIVE FOREST MANAGEMENT FOR TOURISM ACTIVITIES IN TUMPAK LEGO)*

**Antin Nurvidi Astuti, Yusuf Adam Hilman**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia  
Email: adam\_hilman@umpo.ac.id

*Diterima: 17 Oktober 2025; Direvisi: 11 Desember 2025; Disetujui: 16 Desember 2025*

### ABSTRAK

Tumpak Lego merupakan kawasan hutan produksi yang di jadikan destinasi wisata, letaknya berada di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tumpak Lego menawarkan lanskap yang indah, keanekaragaman hayati, serta kondisi ekosistem yang masih terjaga, akan tetapi, pemanfaatan hutan ini untuk wisata masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya regulasi, serta keterbatasan promosi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tata kelola Tumpak Lego, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengembangan wisata berbasis hutan produktif, serta menganalisis hubungan atau relasi antar aktor dalam pengelolaan Tumpak Lego. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil analisis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan Tumpak Lego sebagai destinasi wisata menunjukkan upaya adaptif dalam memanfaatkan potensi alam dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Faktor pendukungnya, antara lain: keindahan alam hutan pinus yang asri, integrasi kuliner lokal dan serta partisipasi aktif masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Faktor penghambat adalah anggaran, di mana biaya pengembangan cenderung melampaui estimasi dana yang dibutuhkan, Hubungan antara Perhutani, investor, dan lembaga masyarakat desa hutan diatur dalam perjanjian kerjasama, menciptakan akuntabilitas dalam pembagian peran.

**Kata kunci:** *Good Governance*, Hutan Produktif, Tumpak Lego

### ABSTRACT

*Tumpak Lego is a production forest area that has been turned into a tourist destination, located in Ngrayun District, Ponorogo Regency, East Java. Tumpak Lego offers beautiful landscapes, biodiversity, and well-preserved ecosystems. However, the use of this forest for tourism still faces various challenges, such as a lack of supporting infrastructure, minimal regulations, and limited promotion and community participation in tourism management. The purpose of this study is to examine the governance of Tumpak Lego, the factors that support and hinder the development of productive forest-based tourism, and to analyse the relationships between actors in the management of Tumpak Lego. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. The results of the analysis in this study explain that the management of Tumpak Lego as a tourist destination shows adaptive efforts in utilising natural potential while still paying attention to the principles of sustainability. Supporting factors include the beauty of the lush pine forest, the integration of local cuisine, and the active participation of the community, which contributes to increased income and job creation. The inhibiting factor is the budget, where development costs tend to exceed the estimated funds required. The relationship between Perhutani,*

*investors, and village forest community institutions is regulated in cooperation agreements, creating accountability in the division of roles.*

**Keywords:** *Good Governance, Productive Forests, Tumpak Lego*

## PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya alam yang menyediakan berbagai barang dan jasa. Penting untuk mengelolanya dengan cara terbaik dan berkelanjutan agar hutan tetap ada. Untuk memastikan hutan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, pengelolaannya harus fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha dan peningkatan fungsi hutan untuk kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan ini bertujuan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun selalu dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Di Indonesia, hutan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan peruntukannya, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan rakyat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Hutan lindung berfungsi untuk menjaga sistem penyangga kehidupan, seperti mencegah erosi dan mempertahankan kualitas air. Hutan konservasi mencakup kawasan taman nasional dan suaka margasatwa yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Hutan produksi, yang merupakan fokus penelitian ini, diarahkan untuk menghasilkan hasil hutan kayu dan non-kayu secara berkelanjutan. Sementara itu, hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan izin tertentu untuk tujuan ekonomi.

Dari berbagai jenis tersebut, hutan produksi atau hutan produktif menjadi salah satu yang banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki manfaat ekonomi yang signifikan tanpa mengabaikan aspek ekologi. Hutan produktif dapat dikelola dengan sistem agroforestri, perhutanan sosial, atau model ekowisata yang mengombinasikan produksi hasil hutan dengan aktivitas wisata berbasis alam (Damanik & Weber, 2006). Pemerintah Indonesia melalui skema Perhutanan Sosial telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola hutan produktif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Tren ekowisata berbasis hutan produktif pun semakin berkembang sebagai bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Hutan bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata alam untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menambah pendapatan. Menurut Arida (2017), ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab di lokasi alami. Pengelolaannya berlandaskan prinsip alam dan bertujuan tidak hanya untuk menikmati keindahan, tetapi juga untuk memberikan edukasi, meningkatkan pemahaman, mendukung pelestarian alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ekowisata telah mengalami pertumbuhan pesat, mencapai 20% hingga 34% per tahun sejak 1990. Hal ini menunjukkan potensi besar ekowisata sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, ekowisata dapat memberikan manfaat besar, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah (Nudwi, 2011).

Salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata berbasis hutan produktif adalah Hutan Produktif Tumpak Lego di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki bentang alam yang beragam, termasuk kawasan perbukitan dan hutan produktif yang masih alami. Hutan Tumpak Lego menawarkan lanskap yang indah, keanekaragaman hayati, serta kondisi ekosistem yang masih terjaga, menjadikannya destinasi potensial untuk pengembangan wisata berbasis alam (Fandeli & Mukhlison, 2000). Namun, pemanfaatan hutan ini untuk wisata masih menghadapi berbagai

tantangan, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya regulasi tata kelola, serta keterbatasan promosi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Model tata kelola pengembangan hutan produktif yang efektif harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan orientasi konsensus. Dalam konteks hutan produktif, partisipasi berarti melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari masyarakat adat dan lokal, pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa kepentingan dan pengetahuan lokal terakomodasi, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Transparansi menuntut akses informasi yang mudah dan terbuka mengenai kebijakan, perizinan, alokasi sumber daya, dan pendapatan dari hasil hutan, penting untuk mencegah korupsi dan memastikan keadilan dalam distribusi manfaat. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab semua pihak terhadap komitmen dan hasil yang telah disepakati, dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Penerapan prinsip-prinsip ini krusial untuk menciptakan legitimasi dan kepercayaan dalam pengelolaan hutan, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan produksi dan manfaat sosial ekonomi (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Prayitno et al. (2020), pengelolaan hutan berbasis wisata harus mengedepankan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek konservasi, ekonomi, dan sosial. Tanpa adanya tata kelola yang baik, pemanfaatan hutan produktif sebagai destinasi wisata justru dapat berdampak negatif pada ekosistem dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Kajian terbaru oleh United Nations World Tourism Organization (2023) juga menyoroti bahwa destinasi wisata berbasis hutan di berbagai negara mengalami peningkatan kunjungan pasca-pandemi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas serta dukungan dari masyarakat lokal.

Penelitian ini berfokus pada tata kelola pengembangan hutan produktif untuk aktivitas wisata, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam konteks lokal, terutama di Tumpak Lego. Pada penelitian ini dapat ditambahkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun sudah banyak studi mengenai ekowisata, masih terdapat celah dalam penerapan prinsip keberlanjutan di sektor hutan produktif. Misalnya, Prayitno et al. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis wisata harus mengedepankan aspek konservasi, ekonomi, dan sosial, sehingga tanpa tata kelola yang baik, penggunaan hutan produktif sebagai destinasi wisata dapat berdampak negatif pada ekosistem dan ekonomi masyarakat. Di samping itu, kajian (United Nations World Tourism Organization, 2023) menyoroti bahwa tren kunjungan wisata berbasis hutan meningkat pasca-pandemi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan dukungan masyarakat lokal.

Penelitian ini tidak hanya melihat aspek kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga mendalami peran partisipasi masyarakat dan dukungan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan ekowisata berbasis hutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, melainkan juga melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengembangan Hutan Produktif Tumpak Lego sebagai destinasi wisata berbasis alam, serta menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung keberlanjutan ekowisata di kawasan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan hutan produktif, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memperkaya kajian akademik terkait ekowisata berbasis perhutanan sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis tata kelola pengelolaan hutan produktif dalam mendukung aktivitas wisata di Hutan Produktif Tumpak Lego (Creswell, 2017). Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan waktu penelitian berlangsung dari Mei hingga Juni 2025. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pengelola hutan yaitu Perum Perhutani KPH Lawu Ds. Divisi Regional Jawa Timur dan Asisten Perhutani BKPH Ponorogo Selatan KPH lawu DS, masyarakat lokal yaitu warga yang secara langsung memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonomi dan sosial, dan pelaku usaha yaitu pemilik usaha terkait wisata yang beroperasi di sekitar kawasan hutan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada informan utama, observasi lapangan untuk mengamati kondisi langsung hutan dan aktivitas wisata, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder seperti laporan dan kebijakan resmi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, menggunakan triangulasi metode, dan melakukan konfirmasi hasil kepada informan (*member checking*) (Patton, 2002).

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis ini dimulai dengan reduksi data, di mana informasi yang tidak relevan akan disaring. Selanjutnya, data akan diorganisir melalui koding dan kategorisasi berdasarkan tema-tema utama seperti kebijakan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan tantangan pengelolaan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan berdasarkan pola yang muncul dari analisis data (Braun & Clarke, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*“Proses kerja sama antara Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan dan pihak investor atau pengelola dijelaskan secara sangat detail dan berurutan. Mulai dari pengajuan surat dan proposal, tahap inventarisasi atau uji kelayakan, pengukuran cek lapangan, penyusunan tapping plan untuk mengecek dampak lingkungan, hingga analisis rencana dan pembagian hasil, semua tahapan ini menunjukkan keterbukaan informasi. Adanya Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerjasama) yang menjadi dasar hukum aktivitas juga menegaskan bahwa semua pihak memiliki akses terhadap ketentuan yang disepakati, memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan, serta menunjukkan perubahan status hutan dari produksi ke wisata yang melalui persetujuan berjenjang dan diatur oleh regulasi seperti Perdir 6 tahun 2024” (Interview Dadang Rimbawan, 2025).*

*“Transparansi juga terlihat dari pengakuan terbuka Perhutani mengenai status Tumpak Lego sebagai “wisata rintisan” yang belum setara dengan destinasi yang sudah mapan, serta penjelasan mengenai aturan khusus seperti KKPP (Kerjasama Kehutanan Perhutani Produktif) yang mensyaratkan investor memiliki basic, kompetensi, dan modal yang matang” (Interview Bapak Arif Yuwono, 2025).*

*“Cara membangun kemitraan atau kolaborasi, termasuk dengan pemerintah lokal, masyarakat, pelaku wisata lainnya, organisasi lingkungan, dan investor. Adanya pengakuan terhadap tantangan dalam kemitraan seperti perbedaan tujuan, komunikasi yang tidak efektif, atau kurangnya kepercayaan, semakin memperkuat aspek transparansi. Mengidentifikasi masalah-masalah ini secara terbuka adalah langkah krusial untuk membangun kepercayaan dan menemukan solusi bersama, yang pada akhirnya memperkuat fondasi tata kelola yang baik” (interview bapak purwanto, 2025).*

*“Salah satu indikator utama adalah kebijakan tarif yang inklusif; dengan hanya Rp10.000, semua pengunjung dapat menikmati beragam fasilitas, menciptakan akses yang setara tanpa diskriminasi. Lebih dari itu, komitmen terhadap keadilan ekonomi lokal terlihat jelas melalui prioritas melibatkan masyarakat sekitar dalam berbagai aspek operasional wisata. Ini bukan hanya janji, melainkan praktik nyata di mana pengelola secara signifikan merekrut tenaga kerja dari warga setempat untuk posisi seperti pemeliharaan kebersihan, parkir, dan penjagaan loket, menjamin bahwa manfaat langsung dari pariwisata dirasakan oleh komunitas yang paling terdampak” (Interview Bapak dadang Rimbawan, 2025).*

*“Aspek keadilan juga diperkuat dengan adanya pemberdayaan UMKM lokal secara aktif, di mana banyak warung yang sebelumnya beroperasi di rumah kini dipindahkan dan berpartisipasi langsung di area wisata. Ini adalah langkah konkret untuk mendistribusikan peluang ekonomi secara merata dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis kecil di sekitar destinasi. Selain itu, kolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang didirikan oleh kepala desa, serta pelibatan Karang Taruna dalam pemasaran, memastikan bahwa representasi masyarakat dan pemuda setempat memiliki peran dan suara dalam pengelolaan wisata” (Interview Bapak Arif Yuwono, 2025).*

*“Peningkatan pendapatan signifikan bagi masyarakat lokal yang dilaporkan oleh Bapak Purwanto, dari maksimum Rp200.000/hari menjadi Rp600.000/hari di akhir pekan, adalah bukti nyata bahwa pendekatan yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi telah berhasil diterapkan” (interview bapak purwanto, 2025).*

*“Efektivitas pengelolaan Wisata Tumpak Lego Hill terlihat jelas dari dampak positif yang dirasakan masyarakat lokal dan pengunjung. Dukungan penuh masyarakat, investor lokal, menjadi fondasi utama keberhasilan ini, terbukti dari partisipasi aktif dalam tenaga kerja dan pengembangan UMKM sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tercapai secara efektif. Pengelolaan yang baik tidak hanya berfokus pada pengembangan produk wisata, tetapi juga pada promosi, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan manajemen tata kelola destinasi, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sujarwo. Pendekatan ini menunjukkan upaya komprehensif untuk memastikan operasional yang optimal. Integrasi aktivitas wisata melalui zonasi khusus, pengaturan aliran pengunjung, dan kerja sama dengan masyarakat lokal juga menjadi bukti efisiensi dalam penataan ruang dan pengelolaan pengunjung. Selain itu, praktik baik seperti pengelolaan sampah yang efektif, pengamanan yang memadai, dan edukasi pengunjung menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan keselamatan, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak pengunjung dan mengurangi biaya jangka panjang yang mungkin timbul dari kerusakan lingkungan atau insiden keamanan” (Interview Bapak Sujarwo, 2025).*

*“Fasilitas yang tersedia sebagai kebutuhan dan kenyamanan pengunjung telah dipertimbangkan dengan baik. Meskipun minim dukungan fasilitas langsung dari pemerintah, Perhutani berhasil memanfaatkan saluran pemasaran tidak langsung melalui media sosial dan berita, menyoroti efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk promosi. Strategi promosi digital ini, seperti penggunaan media sosial,*

*konten visual menarik, dan influencer marketing, secara efektif menjangkau target pasar yang lebih luas” (interview Bapak Arif Yuwono, 2025).*

*“Tantangan yang dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas ke depan. Faktor penghambat utama adalah anggaran yang seringkali melebihi perkiraan dan potensi kemacetan biaya yang dapat menghambat pengembangan” (Interview Bapak Dadang Rimbawan, 2025).*

*“Akses menuju lokasi dan infrastruktur yang masih kurang, menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pengunjung. Meskipun demikian, Tumpak Lego Hill memiliki faktor pendukung kuat seperti suasana hutan pinus alami, udara segar di ketinggian 700 mdpl, dan integrasi kuliner lokal, yang menjadi daya tarik unik. Untuk menjaga keberlanjutan, inovasi seperti pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, penggunaan teknologi digital, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengembangan produk wisata unik, serta kemitraan dengan berbagai pihak, menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar” (Interview Bapak Purwanto, 2025).*

*“Akuntabilitas dalam pengelolaan Wisata Tumpak Lego Hill sangat ditekankan melalui kerangka kerja sama yang jelas dan peran masing-masing pihak. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerjasama) yang ditandatangani oleh Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan, Koperasi (Paster Lawu), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, setiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang spesifik. Perhutani, dalam perannya, secara akuntabel melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di dalam kawasan wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional wisata tidak merusak hutan dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Model pengelolaan ini menunjukkan bahwa Perhutani menyediakan lokasi, sementara investor (pengelola) bertanggung jawab atas modal dan operasional, dengan Perhutani tetap mengawasi kepatuhan terhadap regulasi” (interview Bapak Dadang Rimbawan, 2025).*

*“Upaya konkret untuk menjaga Sumber Daya Alam meliputi pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem, penggunaan sumber daya yang bijak, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, dan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Keterlibatan organisasi masyarakat lokal, seperti Ikatan Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Ngrayun yang berpartisipasi dalam pemeliharaan Sumber Daya Alam dengan menanam tanaman hias, menunjukkan adanya akuntabilitas kolektif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan Tumpak Lego Hill. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menjaga akuntabilitas, seperti risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang tidak terkontrol, pengelolaan pengunjung yang banyak, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun, upaya untuk mengatasi tantangan ini, seperti pengelolaan sampah, pengawasan, pendidikan lingkungan, pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, dan pengembangan wisata berkelanjutan, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Indikator keberhasilan pengelolaan wisata, seperti jumlah pengunjung, pendapatan, kepuasan pengunjung, peningkatan ekonomi lokal, kualitas lingkungan, serta kerja sama dan kemitraan, menjadi tolok ukur akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pihak bertanggung jawab tidak hanya terhadap aspek finansial dan operasional,*

*tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari keberadaan Wisata Tumpak Lego Hill” (interview Bapak Sujarwo, 2025).*

Penerapan teori *Good Governance* menjadi krusial dalam tata kelola hutan produktif di wilayah Tumpak Lego, terutama dalam alih fungsi kawasan hutan pinus untuk wisata. Konsep ini menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber (United Nations World Tourism Organization, 2023). Teori *Good Governance* digunakan untuk menganalisis sejauh mana tata kelola pengelolaan hutan produktif ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek regulasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan dana serta kebijakan.

Aspek transparansi dalam tata kelola Tumpak Lego dapat dilihat dari proses regulasi yang ketat dan bertahap. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dadang Rimbawan, Arif Yuwono, serta bapak Purwanto, alih fungsi hutan produksi pinus menjadi kawasan wisata memerlukan pengajuan proposal, inventarisasi, dan uji kelayakan oleh Perhutani, hingga penerbitan Perjanjian Kerja Sama. Seluruh tahapan ini menunjukkan adanya kerangka kerja yang jelas dan terekam, yang secara teoritis mendukung keterbukaan informasi, namun, untuk mencapai standar transparansi penuh, akses publik terhadap detail bagi hasil, laporan keuangan, dan hasil evaluasi dampak perlu ditingkatkan agar masyarakat dan *stakeholder* dapat memantau secara lebih komprehensif, senada dengan pendapat tersebut transparansi dalam pengelolaan destinasi wisata memerlukan akses terhadap semua informasi pendukung, supaya bisa memunculkan kepercayaan (Seputro, H. Y., & Mustafida, E. F. 2023) (Akhyar, A., & Syarif, S. 2024).

Prinsip partisipasi telah terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan operasional wisata Tumpak Lego. Bapak Sujarwo dan Bapak Arif Yuwono sama-sama menegaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja, mulai dari pemeliharaan kebersihan, parkir, hingga penjagaan loket, diambil dari warga sekitar. Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan pelibatan Karang Taruna dalam pemasaran juga menjadi bukti partisipasi. Organisasi masyarakat seperti Ikatan Persaudaraan Setia Hati Terate turut berkontribusi dalam pemeliharaan Sumber Daya Alam dengan penanaman tanaman hias. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek yang aktif dan diberdayakan dalam pengembangan wisata, senada dengan hal tersebut maka penting partisipasi dalam bentuk keterlibatan semua aktor dalam pengembangan obyek wisata, supaya bisa optimal dan sukses dalam pengelolaan (Arrahmah, N., & Wicaksono, F. 2024), (Udayani, N. P. D., Dewi, N. D. U., & Widnyani, I. A. S. 2024).

Prinsip akuntabilitas di Tumpak Lego dipusatkan pada Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan. Bapak Dadang Rimbawan menjelaskan bahwa Perhutani memikul tanggung jawab penuh dalam monitoring dan evaluasi segala kegiatan di kawasan wisata, memastikan tidak ada kerusakan lingkungan dan setiap aktivitas mematuhi peraturan yang ada. Model pengelolaan yang melibatkan Perhutani menyediakan lokasi sementara investor menanggung modal dan operasional, juga menggambarkan pembagian tanggung jawab yang jelas, namun, agar akuntabilitas ini tidak hanya bersifat internal, mekanisme pengawasan Perhutani perlu dikomunikasikan secara lebih transparan kepada publik. Hal ini memungkinkan masyarakat luas untuk memantau dan mempertanyakan kinerja, sehingga akuntabilitas menjadi lebih kuat dan komprehensif. Secara keseluruhan, Tumpak Lego telah menunjukkan komitmen terhadap *Good Governance* melalui partisipasi aktif masyarakat dan proses regulasi yang transparan, namun peningkatan akses informasi terkait aspek keuangan dan pengawasan akan lebih mengoptimalkan tata kelola hutan produktifnya. Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu, terkait pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap program pemanfaatan sumber daya alam supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (Yani A, 2021).

Prinsip efektivitas pengelolaan terlihat dari dampak positif yang dihasilkan Tumpak Lego. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan

pengembangan UMKM di sekitar area wisata, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Purwanto, adalah indikator keberhasilan yang nyata. Fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun, seperti rumah makan, area *camping*, dan spot foto, juga menunjukkan efektivitas dalam menarik pengunjung dan memberikan pengalaman yang memadai. Dari sisi kebijakan, Perhutani berhasil bertransformasi dari hutan produksi pinus menjadi kawasan wisata, yang mencerminkan efektivitas dalam adaptasi regulasi dan pemanfaatan potensi kawasan. Dampak atau efek yang ditimbulkan merupakan hal yang menjadi tolak ukur apakah pengembangan kawasan itu berhasil atau tidak, atau sejauhmana efektifitas program itu dicapai (Nuralam, N. N., Walangitan, H. D., & Langi, M. A., 2015), (Cahyowati, R. R., Asma, G., & Wibowo, G. D. H., 2023).

Meskipun demikian, tantangan dalam mencapai efisiensi dan optimalisasi *Good Governance* masih ada. Keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan Sumber Daya Manusia terampil, serta risiko dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul, menjadi kendala yang perlu diatasi. Pergeseran regulasi Perhutani ke pendekatan yang lebih berorientasi bisnis (Perdir 6 tahun 2024) menuntut kesiapan material yang lebih besar dari investor, yang di satu sisi mendorong efisiensi finansial, namun di sisi lain perlu diimbangi dengan upaya mitigasi agar tidak mengesampingkan aspek partisipasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, tata kelola Tumpak Lego ke depan harus terus memperkuat kolaborasi multi-pihak, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta secara konsisten menerapkan seluruh prinsip *Good Governance* untuk mengatasi hambatan dan memastikan keberlanjutan hutan produktif dan pariwisata yang saling menguntungkan.

Faktor pendukung utama terletak pada karakteristik alam dan kerangka pengelolaan yang ada. Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rimbawan bahwa Tumpak Lego memiliki daya tarik kuat berkat hutan pinus alami yang sejuk, udara segar, dan pemandangan indah, diperkaya oleh integrasi kuliner lokal dan fasilitas penunjang seperti area *camping*. Dari perspektif *Good Governance*, dukungan ini diperkuat oleh adanya Perjanjian Kerjasama antara Perhutani sebagai pemilik lahan, Koperasi Paster Lawu, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rimbawan), menunjukkan upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian peran. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam operasional dan pengembangan UMKM (Hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo dan Bapak Purwanto) menjadi pendorong ekonomi signifikan, mencerminkan prinsip partisipasi dan efektivitas yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pengembangan wisata Tumpak Lego juga dihadapkan pada faktor penghambat yang substansial. Anggaran menjadi kendala utama, di mana biaya pengembangan cenderung melampaui estimasi dan kemacetan dana dapat menghambat proyek (Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rimbawan). Kondisi jalur menuju wisata yang ekstrem dan kerentanan terhadap cuaca buruk seperti hujan dan longsor juga menimbulkan tantangan operasional (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto). Berdasarkan sudut pandang *Good Governance*, hambatan ini mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi dalam perencanaan anggaran serta efektivitas dalam mitigasi risiko lingkungan dan infrastruktur. Bapak Arif Yuwono juga menyoroti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia terampil, dan tantangan pengamanan sebagai kendala yang perlu diatasi.

Analisis *Good Governance* juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya positif, beberapa aspek masih memerlukan penguatan. Dalam hal transparansi pengelolaan dana dan kebijakan, meskipun perjanjian kerjasama telah ada, detail lebih lanjut mengenai bagi hasil dan laporan keuangan mungkin belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Akuntabilitas Perhutani sebagai pengawas perlu didukung dengan mekanisme *feedback* yang lebih sistematis dari masyarakat dan *stakeholder* (Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rimbawan). Tantangan seperti perbedaan tujuan antarpihak, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya kepercayaan dalam kemitraan (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto) juga menunjukkan

bahwa prinsip partisipasi dan koordinasi memerlukan perhatian lebih lanjut agar *Good Governance* dapat diterapkan secara holistik. Masalah utama yang menjadi penghambat dari berbagai literatur antara lain: 1). Masalah anggaran (Widodo, A. A., & Lestari, H., 2016) 2). Kurang SDM (Selvia, S. I., & Danasari, I. F., 2023), (Atmaja, H. E., & Ratnawati, S, 2020), 3. Kurangnya teknologi (Hubbansyah, A. K., Baharuddin, G., & Munira, M., 2023).

Mencapai pembangunan yang berkelanjutan untuk destinasi tumpak lego harus terus melakukan inovasi. Strategi seperti pemasaran dan pengelolaan wisata yang baik (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto), pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang efektif (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto) menjadi kunci. Secara *Good Governance*, ini berarti memperkuat kemitraan dengan pemerintah lokal, organisasi lingkungan, dan investor (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto), seraya memastikan komunikasi yang transparan dan efektif antar semua pihak (Hasil wawancara dengan Bapak Purwono). Dengan mengatasi hambatan melalui penerapan prinsip *Good Governance* yang lebih mendalam, Tumpak Lego berpotensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata berbasis hutan produktif yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga lestari secara lingkungan dan sosial.

Aktor utama dalam pengelolaan Tumpak Lego adalah Perum Perhutani, investor (masyarakat lokal), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Bapak Dadang Rimbawan dari Perhutani KPH Lawu Ds menjelaskan bahwa hubungan mereka diikat oleh Perjanjian Kerjasama, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, masing-masing aktor berperan untuk memaksimalkan kerjasama yang dilakukan (Sitorus, N. I. B., 2020) Aulia, F., Bkti, H., & Susanti, E., 2021). Perhutani berperan sebagai pemilik kawasan hutan dan pengawas, sedangkan investor bertanggung jawab atas modal dan operasional Model kemitraan ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas, yang merupakan fondasi akuntabilitas dan efisiensi, namun, tantangan muncul dari perbedaan tujuan, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya kepercayaan antarpihak yang dapat menghambat optimalisasi kolaborasi (Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P., 2022).

Secara keseluruhan, meskipun hubungan antaraktor di Tumpak Lego menunjukkan upaya signifikan dalam menerapkan prinsip *Good Governance*, terutama dalam aspek partisipasi dan pembagian peran yang jelas, masih ada ruang untuk perbaikan. Pengembangan infrastruktur, perizinan, promosi, dan dukungan keuangan adalah beberapa area di mana kolaborasi multi-pihak dapat diperkuat. Mengatasi tantangan seperti perbedaan tujuan, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan membangun kepercayaan antaraktor akan krusial. Dengan demikian, penguatan hubungan relasi berdasarkan prinsip *Good Governance* akan mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan, memastikan Tumpak Lego tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai model tata kelola hutan produktif yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Tata kelola hutan produktif untuk aktifitas wisata di kawasan Tumpak Lego, dilakukan secara adaptif untuk menjawab tantangan dan kebutuhan produk wisata, proses alih fungsi lahan dilakukan secara ketat dan juga selektif, hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan hutan. Perum Perhutani membuat perjanjian kerjasama dengan investor lokal dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, mencoba menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan konservasi lingkungan. Perhutani berperan sebagai pemilik dan pengawas, memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak hutan, sementara investor bertanggung jawab atas modal dan operasional, serta masyarakat lokal terlibat aktif dalam berbagai aspek layanan wisata dan UMKM. Pengelolaan Tumpak Lego menegaskan pentingnya kolaborasi multi-pihak, sehingga hubungan antara Perhutani, investor, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan diatur dalam perjanjian kerjasama, menciptakan akuntabilitas dalam pembagian peran.

## REKOMENDASI

1. Pengelola hutan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan.
2. Pengelola hutan perlu mengembangkan infrastruktur wisata yang memadai dan meningkatkan kualitas pelayanan wisata untuk meningkatkan kepuasan pengunjung.
3. Pengelola hutan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengembangan hutan produktif untuk aktivitas wisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, hutan produktif di Tumpak Lego dapat menjadi destinasi wisata yang populer dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat lokal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Suranto dan Ibu Winarti, atas curahan kasih sayang, doa, serta semangat yang tak pernah putus, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Rasa terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada suami tercinta, Aldi Setyovani, yang senantiasa memberikan semangat, waktu, dan tenaganya, serta selalu mendampingi saya dalam setiap perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, saya menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf Adam Hilman, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi saya, atas bimbingan, ilmu, dan kesediaannya membantu hingga tugas akhir ini rampung. Kepada semua sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, terima kasih atas kebersamaan kita. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan melewati masa-masa sulit, sehingga berhasil menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A., & Syarif, S. (2024). Tantangan dan Peluang Inovasi Kebijakan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 832-843
- Atmaja, H. E., & Ratnawati, S. (2020). Pengembangan pariwisata melalui integrasi perencanaan sumber Daya Manusia dengan Perencanaan Strategis objek Wisata Taman Bunga manohara. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 3(1), 49-69.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741-756.
- Arida, I. N. S. (2017). *Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan EKowisata*. Cakra Press bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Arrahmah, N., & Wicaksono, F. (2022). Dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata hutan mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(1), 13-24.
- Aulia, F., Becti, H., & Susanti, E. (2021). Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataaan Di Desa Wisata Kubu Gadang. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 108-114.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Cahyawati, R. R., Asma, G., & Wibowo, G. D. H. (2023). Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Andi.
- Fandeli, C., & Mukhlison. (2000). *Pengelolaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan UGM.
- Hubbansyah, A. K., Baharuddin, G., & Munira, M. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Cilegon: Peluang & Tantangan. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 6(2), 213-225.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan pengelolaan hutan produksi berkelanjutan di Indonesia*. KLHK.
- Nudwi. (2011). *Ekowisata sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi*. <http://nudwi.wordpress.com/2011/06/29/ekowisata-sebagai%0Aupaya-pembangunan-ekonomi/>
- Nuralam, N. N., Walangitan, H. D., & Langi, M. A. (2015). Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Taman Wisata Alam Batuputih dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Prayitno, H., Rahmawati, A., & Setiawan, B. (2020). Tata Kelola Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Hutan Tropika*, 26(3), 211–225.
- Sitorus, N. I. B. (2020). Peran dan kolaborasi stakeholder pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 6(2).
- Selvia, S. I., & Danasari, I. F. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Photomapping Daya Tarik Wisata dan Analisis SWOT di Desa Tetebatu. *AGROTEKSOS*, 33(1), 117-128.
- Seputro, H. Y., & Mustafida, E. F. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wisata: Peran Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pengelola Wisata, dan Transparansi. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 15(2), 57-68.
- Udayani, N. P. D., Dewi, N. D. U., & Widnyani, I. A. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Timpag. *UNES Law Review*, 6(4), 11833-11838.
- United Nations World Tourism Organization. (2023). *World tourism highlights*. UNWTO.
- Widodo, A. A., & Lestari, H. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 543-559.
- Yani, A. (2021). Tata Kelola Desa Wisata di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 4(2), 115-124.